

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN OMNIBUS LAW PADA  
HEADLINE TABLOID PK IDENTITAS UNHAS**

**Kurniya Ismail**

Universitas Hasanuddin, Makassar  
[ismailkurniya@gmail.com](mailto:ismailkurniya@gmail.com)

**Moehammad Iqbal Sultan**

Universitas Hasanuddin, Makassar  
[iqbalsultan@unhas.ac.id](mailto:iqbalsultan@unhas.ac.id)

**Muliadi Mau**

Universitas Hasanuddin, Makassar  
[muliadimau@unhas.ac.id](mailto:muliadimau@unhas.ac.id)

**Muhammad Junaedi**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
[nuhammadjunaedi4321@gmail.com](mailto:nuhammadjunaedi4321@gmail.com)

**ABSTRACT**

This study aims to analyse the framing of Omnibus Law news coverage in the headlines of Tabloid PK Identitas Hasanuddin University using the Pan and Kosicki framing model. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through document analysis and a literature review. The research focused on two headline articles, namely *Mengenai Konsep Baru Penyederhanaan Sistem Hukum Indonesia* and *Pasal Kontroversi dalam Draft RUU Omnibus Law*. The analysis examined four framing structures: syntactical, script, thematic, and rhetorical. The findings reveal that PK Identitas constructs its news framing by positioning academics as the primary source of legitimacy, presenting information systematically through the 5W+1H framework, emphasising the concept of the Omnibus Law and its implications for workers, and employing visual illustrations to reinforce criticism of the policy. In reporting controversial provisions of the draft law, the framing highlights the substance of the regulation and its potential impact on labour protection, while protest imagery is utilised to strengthen the message of social criticism. Unlike mainstream media, which primarily focus on reporting events and political conflict, PK Identitas integrates educational, policy literacy, and social control functions through academically grounded journalism. This study demonstrates that student press organisations possess distinctive framing characteristics in constructing the reality of public policy and serve as alternative media in fostering critical public discourse.

**Keywords:** *Framing; Omnibus Law; Student Press; PK Identitas; Pan and Kosicki.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan Omnibus Law pada headline Tabloid PK Identitas Universitas Hasanuddin menggunakan model

framing Pan dan Gerald Kosicki. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan studi pustaka. Objek penelitian meliputi dua berita headline, yaitu *Mengenal Konsep Baru Penyederhanaan Sistem Hukum Indonesia* dan *Pasal Kontroversi dalam Draft RUU Omnibus Law*. Analisis dilakukan melalui empat struktur framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK Identitas membangun framing dengan menempatkan akademisi sebagai sumber legitimasi utama, menyajikan informasi secara sistematis melalui unsur 5W+1H, mengembangkan tema yang menekankan konsep Omnibus Law beserta dampaknya terhadap pekerja, serta memanfaatkan ilustrasi visual untuk memperkuat kritik terhadap kebijakan. Pada pemberitaan mengenai pasal-pasal kontroversial, framing diarahkan pada substansi regulasi yang dinilai mengurangi perlindungan hak-hak pekerja, sementara visual demonstrasi digunakan sebagai penguat makna kritik sosial. Berbeda dengan media arus utama yang lebih berorientasi pada pelaporan peristiwa dan konflik, PK Identitas mengintegrasikan fungsi edukasi, literasi kebijakan, dan kontrol sosial melalui pemberitaan yang berbasis kajian akademik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pers mahasiswa memiliki karakter framing yang khas dalam mengonstruksi realitas kebijakan publik serta berperan sebagai media alternatif dalam mengawal isu-isu strategis.

**Kata Kunci:** *Framing; Omnibus Law; Pers Mahasiswa; PK Identitas; Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.*

## **A. PENDAHULUAN**

Media massa sangat berperan penting dalam membentuk realitas sosial melalui proses seleksi, penekanan, dan penyajian fakta kepada publik (Claudie dkk., 2025) (Aidah dkk., 2026). Dalam perspektif konstruksionis, berita bukan hanya cerminan realitas, akan tetapi hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan, dan kebijakan redaksional media (Utami & Permana, 2026). Fakta ini tampak jelas dalam pemberitaan mengenai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yang sejak proses pembahasan hingga disahkannya pada tahun 2020 memunculkan pro dan kontra di berbagai kalangan (Sadono & Rahmijai, 2021). Regulasi ini menjadi isu nasional karena dinilai memengaruhi aspek ketenagakerjaan, investasi, lingkungan hidup, serta kepentingan hak-hak masyarakat. Perbedaan kepentingan antara pemerintah, pengusaha, akademisi, buruh, dan masyarakat sipil kemudian lahir berbagai konstruksi pemberitaan di media massa (Wibisana dkk., 2020). Dalam kondisi ini, media tidak hanya sekadar berfungsi sebagai jembatan informasi, tetapi juga sebagai kartu as yang membentuk cara masyarakat memahami dan menafsirkan suatu kebijakan publik dari pemerintah.

Dominasi media arus utama yang dominan, Pers Mahasiswa (Persma) hadir sebagai alternatif yang berfungsi menjalankan kontrol sosial serta menjadi wadah kritis suara masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Zahiruddin dkk., 2025) (Ghassani & Sukowati, 2016). Pers mahasiswa memiliki independensi yang lebih kuat dalam menyuarakan kepentingan publik dan nilai-nilai akademik (Sophianti, 2025) (Angesti dkk., 2026). Hal itu jauh berbeda dengan media konvensional yang

sering kali dipengaruhi kepentingan ekonomi dan politik. Salah satu media mahasiswa (Persma) yang konsisten mengangkat isu-isu sosial dan politik adalah Tabloid PK Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar. Terbukti, dalam pemberitaan mengenai Omnibus Law, media ini tidak sekadar menjadi jembatan informasi, namun juga menghadirkan sudut pandang kritis melalui pemilihan narasumber, struktur berita, tema, dan penggunaan unsur visual. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji bagaimana Tabloid PK Identitas membingkai pemberitaan Omnibus Law sebagai representasi sikap kritis pers mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah.

Penelitian terdahulu mengenai Analisis Framing Pemberitaan Gender dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pada Kompas.com dan Tempo.co (Wibisono, 2024) menemukan fakta bahwa kedua media sama-sama menggunakan struktur framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, tetapi di sisi lain tetap menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda. Misalnya, untuk Kompas.com menyajikan informasi berita dengan skema yang lebih moderat dengan memberikan perspektif pemerintah dan buruh secara berimbang. Sementara dari sisi Tempo.co lebih menonjol dan fokus pada suara buruh perempuan melalui penggunaan diksi yang lebih ekspresif dan kritis. Temuan tersebut disimpulkan bahwa perbedaan kebijakan redaksi memengaruhi cara media membingkai isu Omnibus Law.

Dari penelitian lain (Innayah dkk 2020) berjudul Framing Pemberitaan Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja Komparasi pada Detik.com dan Republika.co.id juga menggunakan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasilnya, ditemukan antara kedua media besar ini membangun framing melalui pemilihan narasumber, kutipan berita, dan penyusunan struktur naskah dalam pemberitaannya. Masing-masing media memiliki strategi framing yang berbeda dalam memperkuat sudut pandang yang ingin ditampilkan kepada pembaca, meskipun Detik.com dan Republika.co.id sama-sama menyampaikan berita yang eksplisit tentang penolakan terhadap Omnibus Law.

Berbeda dengan dua penelitian di atas, penelitian Analisis Framing Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law pada Portal Berita Online (Krida & Widodo, 2023) menggunakan framing model Robert Entman dalam melakukan komparasi pemberitaan antara TvOneNews.com dan Liputan6.com. Hasil penelitian Krido dan Widodo ini menunjukkan bahwa TvOneNews.com lebih menekankan penolakan tenaga kesehatan terhadap RUU Kesehatan, sedangkan Liputan6.com condong menyoroti efek domino yang terjadi terhadap kebijakan RUU Omnibus Law kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Perbedaan hasil temuan penelitian memberikan perspektif bahwa setiap media memiliki fokus isu yang berbeda sesuai dengan fokus dan tujuan yang dibangun dalam pemberitaannya.

Penelitian Megy (2021) yang berjudul Konstruksi Realitas Program Acara Mata Najwa Trans7 (Analisis Framing Robert N. Entman pada Acara Mata Najwa Edisi UU Omnibus Law Cipta Kerja) didapatkan hasil penelitian bahwa program Mata Najwa membingkai demonstrasi mahasiswa sebagai upaya perjuangan mewakili aspirasi masyarakat. Seluruh segmen dalam acara didominasi atas kecenderungan framing yang membentuk citra negatif DPR dan pemerintah sebagai penyebab munculnya konflik sosial yang terjadi. Penelitian Megy kemudian

menunjukkan bahwa framing media tidak sekadar berlandaskan melalui teks berita, namun juga bisa menggunakan narasi, pertanyaan, serta visual yang ditampilkan dalam program televisi.

Sementara itu, penelitian mengenai Pembingkai Berita Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Widiyaningrum & Isnaini, 2021) ditemukan bahwa Liputan6.com dan Tirto.id memiliki konstruksi pemberitaan yang kontras. Pemberitaan yang dibingkai Liputan6.com lebih menitikberatkan pada dampak sosial, yakni kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi. Sementara itu, Tirto.id dalam pemberitaannya menghadirkan informasi yang lebih berimbang dengan berfokus pada tuntutan massa terhadap Undang-Undang Cipta Kerja secara substansial. Perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa framing media sangat dipengaruhi oleh kebijakan editorial atau manajemen redaksi dalam menentukan aspek yang dianggap penting untuk menjadi konsumsi masyarakat.

Melihat beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis framing, pemberitaan dengan titik fokusnya mengarah kepada RUU Omnibus Law masih didominasi oleh penelitian pada media massa arus utama atau media profesional, baik media daring maupun audio visual di televisi, dan dengan disertai objek penelitian berupa media komersial. Penelitian-penelitian yang ada lebih menitikberatkan perbandingan konstruksi realitas antar media profesional, sementara penelitian yang membawa pers mahasiswa sebagai media alternatif yang fokus menjalankan fungsi kritik sosial tanpa kepentingan tertentu masih sangat terbatas. Padahal, pers mahasiswa memiliki karakteristik independensi, orientasi akademik, dan fungsi kontrol sosial yang berbeda dibandingkan media arus utama memiliki peluang memberikan framing yang identik dengan dunia perguruan tinggi terhadap isu kebijakan publik.

Novelty penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu headline Tabloid PK Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan sebagai cerminan pers mahasiswa dalam membingkai pemberitaan isu Omnibus Law. Penelitian ini menggunakan model analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam membangun informasi melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi komunikasi massa, khususnya dalam ruang lingkup mengenai framing pada media alternatif serta menyebarluaskan pemahaman tentang sejauh mana pers mahasiswa berperan dalam menjalankan fungsi kritik sosial terhadap kebijakan publik secara universal dan profesional.

Penelitian yang ditulis mengenai Analisis Framing Pemberitaan Omnibus Law pada Headline Tabloid Pk Identitas Unhas hadir dengan berorientasi pada analisis framing pemberitaan Omnibus Law dalam perspektif pers mahasiswa sebagai media alternatif dengan menggunakan pisau analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Sehingga dari uraian tersebut dapat menjelaskan kehadiran pers mahasiswa dalam mengonstruksi realitas serta menjalankan fungsi kritik sosial melalui praktik pemberitaannya di meja redaksi dalam ruang lingkup perguruan tinggi.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pers Mahasiswa**

Media alternatif pers mahasiswa merupakan organisasi kampus yang dikelola langsung oleh mahasiswa dengan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial. Berbeda dengan media arus utama atau media profesional, pers mahasiswa relatif lebih independen dalam bentuk pemberitaan terkait kebijakan publik karena tidak dibatasi oleh kepentingan bisnis maupun pemilik modal. Pers mahasiswa memiliki keleluasaan dalam mengangkat isu-isu publik secara kritis tanpa dibenturkan dengan pengekanan dari pihak tertentu. Melalui pemberitaan yang berbasis nilai akademik dan kepentingan masyarakat, pers mahasiswa hadir sebagai pemeran penopang media profesional dalam ruang demokrasi sekaligus sarana penyampaian informasi kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun institusi perguruan tinggi.

### **Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki**

Analisis framing melalui model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki memandang bahwa karya jurnalis berita merupakan hasil konstruksi realitas yang disusun melalui proses seleksi serta penonjolan fakta oleh media yang diteliti. Model framing ini dibangun dengan menganalisis empat struktur, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Struktur-struktur tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pola pemberitaan atau penyeberan media menyusun fakta, memilih narasumber, mengembangkan tema, serta menggunakan bahasa dan unsur visual untuk membangun makna tertentu terhadap suatu peristiwa atau isu yang terjadi di khlayak.

## **C. METODE PENELITIAN**

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian dengan metode analisis framing untuk mengkaji cara Tabloid PK Identitas Universitas Hasanuddin membingkai pemberitaan Omnibus Law. Pendekatan ini dipilih karena mampu menerangkan secara eksplisit proses konstruksi realitas yang dibangun media melalui penyajian teks berita. Objek penelitian yang dipilih diantaranya adalah dua headline Tabloid PK Identitas, yaitu "*Mengenal Konsep Baru Penyederhanaan Sistem Hukum Indonesia*" dan "*Pasal Kontroversi dalam Draft RUU Omnibus Law*", yang dipilih secara purposive karena khusus membahas isu Omnibus Law dan merepresentasikan sikap redaksi terhadap kebijakan tersebut.

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen pemberitaan Omnibus Law yang dimuat dalam Tabloid PK Identitas Universitas Hasanuddin, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan referensi lain yang relevan dengan framing media, komunikasi massa, pers mahasiswa, dan Omnibus Law. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis penelitian ini.

Analisis data menggunakan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam empat struktur framing, yaitu struktur sintaksis untuk menganalisis penyusunan fakta dan pemilihan narasumber, struktur skrip untuk mengidentifikasi kelengkapan unsur berita berdasarkan 5W+1H, struktur tematik untuk menilai pengembangan tema dan hubungan antaride dalam teks, serta struktur retorik

digunakan sebagai pisau analisis penggunaan diksi, ilustrasi, dan unsur visual dalam memperkuat pesan pemberitaan. Keempat struktur tersebut digunakan untuk mengungkap cara media mengonstruksi realitas mengenai Omnibus Law.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teori, yaitu membandingkan hasil analisis dengan konsep framing dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-interpretatif dengan menguraikan hasil analisis pada setiap struktur framing, kemudian mengaitkannya dengan teori dan penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kebaruan penelitian mengenai framing pemberitaan Omnibus Law pada pers mahasiswa.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Banyak media massa yang mengulas kontroversi penolakan Omnibus Law secara tidak substansial. Isu yang pada akhirnya berkembang menjadi dampak sosial ini mendorong peneliti untuk mengkaji pemberitaan regulasi tersebut secara mendalam pada Tabloid PK Identitas Unhas edisi Mei 2020, khususnya pada laporan utama berjudul “Omnibus Law, RUU Cilaka atau Celaka”. Perumusan berita pers mahasiswa ini terbukti tidak hanya berfokus pada aksi demonstrasi massa, melainkan juga ikut membedah draf isi materi RUU Omnibus Law. Melalui proses seleksi data, penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada dua judul berita utama dalam edisi tersebut yakni Mengenal Konsep Baru Penyederhanaan Sistem Hukum Indonesia” dan “Pasal Kontroversi dalam Draft RUU Omnibus Law”. Selanjutnya, struktur teks mulai dari judul (*headline*), teras berita (*lead*), dokumentasi foto, hingga tubuh berita dibedah menggunakan pisau analisis pemingkaian model Pan dan Kosicki.

##### **1. Framing Pemberitaan “Mengenal Konsep Baru Penyederhanaan Sistem Hukum Indonesia”**

Hasil analisis framing menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki menunjukkan bahwa berita “*Mengenal Konsep Baru Penyederhanaan Sistem Hukum Indonesia*” dibangun melalui empat struktur framing. Hasil pada struktur sintaksis didapatkan bahwa PK Identitas menempatkan akademisi sebagai narasumber utama untuk memberikan legitimasi terhadap informasi mengenai konsep dan implementasi Omnibus Law. Struktur skrip telah memenuhi unsur 5W+1H, sehingga informasi disajikan secara sistematis dan mudah dipahami. Dalam struktur tematik, pemberitaan mengembangkan dua tema utama, yaitu penjelasan mengenai konsep Omnibus Law dan implikasinya terhadap hak-hak pekerja. Sementara itu, struktur retorik diperkuat melalui penggunaan ilustrasi yang menggambarkan kepentingan investor lebih dominan dibandingkan perlindungan tenaga kerja. Framing yang disampaikan itu ditemukan bahwa PK Identitas tidak sekadar menjadi jembatan informasi mengenai Omnibus Law kepada para pembacanya, akan tetapi juga memberikan pemahaman kritis terhadap dampak kebijakan regulasi ini melalui argumentasi akademik dan penggunaan simbol visual yang memperkuat pesan pemberitaan.

**Tabel 1. Analisis Framing pada Pemberitaan Omnibus Law PK Identitas Unhas "Mengetahui Konsep Baru Penyederhanaan Sistem Hukum Indonesia"**

| No | Struktur Framing | Hasil Analisis                                                                                                                                                    |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sintaksis        | Berita disusun dengan menempatkan akademisi sebagai narasumber utama untuk memberikan legitimasi terhadap informasi mengenai konsep dan implementasi Omnibus Law. |
| 2  | Skrip            | Penyajian berita telah memenuhi unsur 5W+1H sehingga informasi disampaikan secara sistematis dan mudah dipahami pembaca.                                          |
| 3  | Tematik          | Pemberitaan mengembangkan dua tema utama, yaitu penjelasan mengenai konsep Omnibus Law serta dampaknya terhadap hak-hak pekerja.                                  |
| 4  | Retoris          | Ilustrasi digunakan untuk menegaskan bahwa Omnibus Law dipersepsikan lebih mengakomodasi kepentingan investasi dibandingkan perlindungan tenaga kerja.            |

*Sumber: Data Penulis*

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Analisis Framing Pemberitaan Gender dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pada Kompas.com dan Tempo.co (Wibisono, 2024) yang sama-sama menggunakan model framing Pan dan Kosicki. Penelitian tersebut menemukan bahwa kedua media memenuhi struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Meski begitu terdapat perbedaan dalam keberimbangan narasumber dan penggunaan bahasa. Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan struktur framing untuk membangun makna pemberitaan. Sementara dari hasil penelitian untuk PK Identitas ditemukan bahwa pers mahasiswa ini lebih menempatkan akademisi sebagai sumber utama untuk menjelaskan konsep kebijakan, sedangkan Kompas.com dan Tempo.co lebih menampilkan dua sisi yang berbeda yakni dalam perspektif antara pemerintah dan kelompok buruh. Hal ini menunjukkan bahwa framing pers mahasiswa lebih berorientasi pada edukasi publik sebagai media alternatif dibandingkan membangun kompetisi wacana antaraktor (Hadi dkk., 2025) (Mulya dkk., 2026).

Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian Framing Pemberitaan Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja Komparasi pada Detik.com dan Republika.co.id (Innayah dkk., 2020) yang dapat disimpulkan bahwa framing dibentuk melalui pemilihan narasumber, kutipan, dan penyusunan fakta. Persamaan kedua penelitian terletak pada pentingnya pemilihan sumber berita dalam membangun konstruksi realitas. Namun, Detik.com dan Republika.co.id lebih menitikberatkan pemberitaan pada dinamika penolakan Omnibus Law sebagai isu aktual yang menjadi konsumsi nasional, sedangkan PK Identitas lebih mengembangkan framing melalui penjelasan historis dan konseptual mengenai Omnibus Law beserta dampaknya terhadap pekerja. Dengan demikian, hasil dari framing pers mahasiswa lebih condong mengarah pada penerapan literasi kebijakan, bukan sekadar menyampaikan informasi pelaporan peristiwa semata.

Apabila dibandingkan dengan penelitian Analisis Framing Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law pada Portal Berita Online (Krida & Widodo, 2023), kedua penelitian menunjukkan bahwa media memilih fokus tertentu dalam membingkai kebijakan pemerintah. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa TvOneNews.com dan Liputan6.com membangun framing dengan menyasar sisi kelompok masyarakat yang terdampak, sedangkan PK Identitas menitikberatkan pembahasan pada substansi kebijakan Undang-Undang ini melalui pendekatan akademik. Selanjutnya, penelitian Konstruksi Realitas Program Acara Mata Najwa Trans7 (Analisis Framing Robert N. Entman pada Acara Mata Najwa Edisi UU Omnibus Law Cipta Kerja) (Ardiansyah, 2021) ditunjukkan bahwa Mata Najwa mengonstruksi demonstrasi mahasiswa sebagai bentuk perjuangan rakyat dengan menghadirkan citra negatif pemerintah dan DPR. Berbeda dengan itu, PK Identitas yang pada dasarnya hadir sebagai media alternatif tidak memusatkan perhatian pada konflik politik, tetapi lebih menjelaskan konsep Omnibus Law secara argumentatif. Sementara itu, penelitian Pembungkai Berita Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Widiyaningrum & Isnaini, 2021) menemukan bahwa Liputan6.com lebih menyoroti kerusuhan demonstrasi. Dari sisiTirto.id ditemukan berita yang lebih berimbang dalam menyampaikan tuntutan massa. Sebaliknya, PK Identitas tidak menjadikan demonstrasi sebagai fokus utama, akan tetapi melalui isu itu, PK Identitas memanfaatkan situasi sosial yang terjadi tersebut sebagai pintu masuk dalam memberikan pemahaman terperinci mengenai substansi dan pokok kajian pada Omnibus Law. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa framing pers mahasiswa memiliki karakter yang lebih akademik, edukatif, dan berorientasi pada peningkatan literasi kebijakan.

## **2. Framing Pemberitaan "*Pasal Kontroversi dalam Draft RUU Omnibus Law*"**

Berdasarkan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, berita "*Pasal Kontroversi dalam Draft RUU Omnibus Law*" membangun konstruksi realitas melalui penekanan terhadap pasal-pasal yang dinilai berpotensi merugikan pekerja. Pada struktur sintaksis, judul berita secara langsung mengarahkan perhatian pembaca pada kontroversi regulasi yang ada dalam draft RUU tersebut. Struktur skrip telah memenuhi unsur 5W+1H dengan menjelaskan pasal-pasal yang dipersoalkan beserta penerangan terkait alasan munculnya penolakan terhadap Omnibus Law. Struktur tematik berfokus pada substansi pasal yang dianggap melakukan pengurangan pada perlindungan hak-hak pekerja, sedangkan struktur retorik diperkuat melalui penggunaan visual demonstrasi pekerja sebagai simbol penolakan terhadap kebijakan tersebut. Penggunaan ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa PK Identitas mengonstruksi realitas tidak hanya melalui teks berita, tetapi juga melalui unsur visual yang memperkuat fungsi kritik sosial terhadap kebijakan pemerintah.

**Tabel 2. Analisis Framing pada Pemberitaan Omnibus Law PK Identitas Unhas "Pasal Kontroversi dalam Draft RUU Omnibus Law"**

| No | Struktur Framing | Hasil Analisis                                                                                                                                                          |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sintaksis        | Judul berita secara langsung menyoroti kontroversi pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law sehingga mengarahkan perhatian pembaca pada substansi kebijakan yang dipersoalkan. |
| 2  | Skrip            | Unsur 5W+1H disusun untuk menjelaskan pasal-pasal yang dinilai kontroversial beserta alasan munculnya penolakan terhadap Omnibus Law.                                   |
| 3  | Tematik          | Tema utama pemberitaan berfokus pada pasal-pasal yang dianggap berpotensi merugikan pekerja dan mengurangi perlindungan hak-hak ketenagakerjaan.                        |
| 4  | Retoris          | Penggunaan visual demonstrasi pekerja memperkuat makna penolakan terhadap Omnibus Law serta menegaskan fungsi pemberitaan sebagai media kritik sosial.                  |

*Sumber: Data Penulis*

Temuan ini relevan dengan penelitian Analisis Framing Pemberitaan Gender dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pada Kompas.com dan Tempo.co (Wibisono, 2024) yang menunjukkan bahwa media membangun framing melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Setelah dilakukan perbandingan, kesamaan dua penelitian ini terletak pada penggunaan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk mengungkap konstruksi pemberitaan. Adapun dari sisi perbedaan, penelitian terdahulu lebih menyoroti dampak Omnibus Law terhadap perempuan pekerja dan perbedaan sikap antara pemerintah dan buruh, sedangkan PK Identitas secara spesifik dan terang-terangan mengarahkan sorotannya pada pasal-pasal kontroversial yang dianggap mengurangi perlindungan tenaga kerja. Dengan demikian, fokus framing dalam penelitian ini lebih menitikberatkan analisis terhadap isi regulasi yang dinilai menjadi sumber perdebatan pro-kontra daripada representasi aktor.

Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan Framing Pemberitaan Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja Komparasi pada Detik.com dan Republika.co.id (Innayah dkk., 2020), yaitu sama-sama menunjukkan bahwa pemilihan narasumber dan penyusunan fakta menjadi unsur penting dalam membangun framing. Akan tetapi, Detik.com dan Republika.co.id lebih condong pada pelaporan dinamika penolakan Omnibus Law sebagai peristiwa nasional, sedangkan PK Identitas memakai pemberitaan untuk mengungkapkan substansi pasal-pasal kontroversial secara lebih naratif dan argumentatif. Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian Pembingkai Berita Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Widiyaningrum & Isnaini, 2021) yang menemukan bahwa media membangun realitas melalui penonjolan aspek tertentu dalam demonstrasi. Perbedaannya, Liputan6.com lebih tertarik menyampaikan pemberitaan kerusuhan demonstrasi sementara Tirto.id membangun pemberitaan yang lebih berimbang.

Hasil penelitian PK Identitas menggunakan visual demonstrasi hanya sebagai penguat pesan, sementara fokus utama tetap berada pada analisis isi kebijakan.

Selanjutnya, penelitian ini memiliki keterkaitan dengan Analisis Framing Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law pada Portal Berita Online (Krida & Widodo, 2023) dan Konstruksi Realitas Program Acara Mata Najwa Trans7 (Analisis Framing Robert N. Entman pada Acara Mata Najwa Edisi UU Omnibus Law Cipta Kerja) (Ardiansyah, 2021). Kedua penelitian terdahulu yang relevan tersebut menunjukkan bahwa media mengonstruksi realitas berdasarkan sudut pandang tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Akan tetapi, penelitian mengenai RUU Kesehatan Omnibus Law lebih menyoroti kelompok yang terdampak, sedangkan Mata Najwa lebih membangun citra perjuangan mahasiswa dan kritik terhadap pemerintah. PK Identitas kemudian memberikan perbedaan, redaksi pers mahasiswa itu lebih mengembangkan framing yang berorientasi pada analisis regulasi melalui penjelasan pasal-pasal kontroversial yang disertai argumentasi akademik. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa pers mahasiswa memiliki karakter framing yang berbeda dengan media arus utama karena mengintegrasikan fungsi edukasi, kontrol sosial, dan literasi kebijakan dalam satu konstruksi pemberitaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu pers mahasiswa, yang menunjukkan bahwa framing tidak sekadar berfungsi membentuk opini publik semata, namun di sisi lain juga mengokohkan penguatan peran intelektual mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik secara kritis dan tentu akademis.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Tabloid PK Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar membangun framing pemberitaan Omnibus Law melalui empat struktur framing Pan dan Kosicki, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Pada kedua berita yang dianalisis, struktur sintaksis menunjukkan kecenderungan redaksi memilih akademisi sebagai sumber legitimasi informasi, sementara struktur skrip telah memenuhi unsur 5W+1H sehingga pemberitaan disajikan secara sistematis dan jelas. Struktur tematik menekankan substansi Omnibus Law, khususnya pada wilayah konsep kebijakan dan dampaknya terhadap perlindungan tenaga kerja, sedangkan struktur retorik memanfaatkan ilustrasi visual untuk memperkuat pesan kritik sosial yang dibingkai dalam estetika. Temuan tersebut menunjukkan bahwa framing yang dibangun PK Identitas tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi sebagai pers, tetapi lebih dalam juga mengarahkan pembaca untuk memahami kebijakan secara utuh melalui perspektif akademik dan kepentingan publik.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan kajian framing media dengan menjadikan pers mahasiswa sebagai objek penelitian, yang masih relatif jarang dikaji dibandingkan media arus utama. Penelitian menunjukkan bahwa karakter framing pers mahasiswa berbeda dari media profesional karena mengintegrasikan fungsi edukasi, literasi kebijakan, dan kontrol sosial dalam setiap bingkai pemberitaan yang disajikan. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi komunikasi massa, khususnya analisis framing pada media alternatif, sekaligus mempertegas peran pers mahasiswa yang tidak hanya

memosisikan diri sebagai pers, tetapi sebagai aktor intelektual yang mampu membangun wacana kritis terhadap kebijakan publik yang menjadi sorotan utama melalui pendekatan yang berbasis kajian akademik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan membandingkan framing Omnibus Law pada berbagai media mahasiswa di Indonesia atau mengomparasikan pers mahasiswa dengan media arus utama sehingga karakteristik framing masing-masing media dapat dipahami secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengombinasikan analisis framing dengan analisis wacana kritis, analisis multimodal, atau analisis resepsi khalayak untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai proses konstruksi media, makna yang dibangun, serta dampaknya terhadap pembentukan opini publik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aidah, S., Amalia, A. R., & Aqida, A. (2026). Media Massa dan Pembentukan Pandangan Politik di Era Digital. *Indonesian Character Journal*, 3(1), 33–44.
- Angesti, A., Elhusein, F., Oktaviani, D. A., & Khoirunnisa, M. (2026). Dinamika Meja Redaksi di Pers Mahasiswa (Studi Kasus pada BPPM Balairung UGM). *KOMID: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 5(1), 1–14.
- Ardiansyah, M. (2021). Konstruksi Realitas Program Acara Mata Najwa Trans7 (Analisis Framing Robert N. Entman pada Acara Mata Najwa Edisi UU Omnibus Law Cipta Kerja). *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 7(October), 2.
- Claudie, Y., Jasmin, N., Jong, D., Muhammad, M., & Doho, Y. D. B. (2025). Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik terhadap Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 01(01).
- Ghassani, V. I., & Sukowati, P. (2016). BENTUK HUBUNGAN PERS DENGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN FUNGSI MEDIA SEBAGAI KONTROL SOSIAL. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2).
- Hadi, S., Sunardi, & Hernanda, T. (2025). Kebebasan Pers Mahasiswa dalam Perspektif Undang Undang Pers dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9312–9322.
- Innayah, Umam, C., & Purwitasari, E. (2020). Framing Pemberitaan Tolak Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Komparasi di Detik.Com dan Republika.co.id. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 52–66.
- Krida, G. W., & Widodo, W. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law pada Portal Berita Online. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 145–153.
- Mulya, F., Azzahra, D., Sr, R., Andhira, S., & Syntia, W. (2026). Analisis Tingkat Literasi Berita Mahasiswa Pers Kampus di Kota Medan Jurnal Komunikasi dan Media. *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 1(2), 50–57.
- Sadono, B., & Rahmiaji, L. R. (2021). PRO KONTRA TERHADAP PROSEDUR DAN SUBSTANSI OMNIBUS LAW RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3).

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3125>

- Sophianti, N. (2025). Peran Mahasiswa dalam Menghadapi Pembungkaman Pers pada Masa Rezim Orde Baru, 1974-1998. *Forum for Social and Humanities Studies*, 1(2).
- Utami, I. I. B., & Permana, I. M. (2026). Dampak Politik Media dan Konstruksi Realitas Masyarakat : Analisis Kritis Politik Media Dalam Pemilu Presiden Indonesia 2019 dalam Perspektif Studi Media dan Budaya. *Science and Education Journal*, 5(2), 512–521.
- Wibisana, N. B., Manalu, S. R., & Lukmantoro, T. (2020). Bias Media dalam Pemberitaan Undang-Undang Cipta Kerja. *Interaksi Online*, November.
- Wibisono, D. J. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Gender dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pada Kompas.com dan Tempo.co. *Journal Politique*, 4(1), 89–103.
- Widiyaningrum, W., & Isnaini, M. (2021). Pembungkaman Berita Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 6(April), 188–203.
- Zahiruddin, M., Jayadi, H., Khair, A., & Ashari. (2025). PERS MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS. *Jurnal Diskresi*, 4(1), 50–61.